

PERAN APARAT KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TALANG SEMUT KOTA PALEMBANG

Andel Anggleni

Program Studi Kebijakan Publik, STIA Satya Negara Palembang

Alamat Korespondensi : andelaanggleni@gmail.com

Abstract: *Officials who are lazy because of the lack of awareness of Talang Semut Village officials in empowering the community. There is a significant gap between expectations and reality in the involvement and support of sub-district officials. This research aims to analyze the role of Talang Semut Village officials in implementing community empowerment in Talang Semut Village. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in research are observation, interviews and documentation. The results of the research are seen from three indicators, namely the norms of Talang Semut Village officials which are the basis for community empowerment, namely openness and transparency, justice and equality, active community participation, sustainability and responsibility, collaboration and partnership, and responsiveness to community needs. These norms were successfully implemented and used as a benchmark in carrying out the role of officials in empowering the community. The behavior of Talang Semut Village officials has been successful in empowering the community even though it is considered weak because no data was found to strengthen the argument. However, efforts to increase community participation, identification of problems and needs, program planning, program implementation, as well as evaluation and monitoring carried out by sub-district officials have had a positive impact and empowered the community effectively.*

Keyword: *Role, Village Officials, Community Empowerment.*

Abstrak: Terdapat aparat yang bermalas-malasan karena kurangnya kesadaran aparat Kelurahan Talang Semut dalam pemberdayaan masyarakat. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan dan realitas dalam keterlibatan dan dukungan aparat kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat Kelurahan Talang Semut dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Semut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah dilihat dari ketiga indikator,

yaitu norma aparat Kelurahan Talang Semut yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu keterbukaan dan transparansi, keadilan dan kesetaraan, partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan dan tanggung jawab, kolaborasi dan kemitraan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Norma-norma tersebut berhasil diimplementasikan dan dijadikan patokan dalam pelaksanaan peran aparat dalam pemberdayaan masyarakat. Perilaku aparat Kelurahan Talang Semut telah berhasil dalam pemberdayaan masyarakat walaupun dinilai lemah karena tidak ditemukannya data sebagai penguat argumentasi. Tetapi, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh aparat kelurahan telah memberikan dampak positif dan memberdayakan masyarakat secara efektif.

Kata kunci: Peran, Aparat Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat.

Pendahuluan

Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi didalam pencapaian tujuan pembangunan nasional (Iskandar, 2020: 21). Sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diwujudkan dalam kebijakan otonomi daerah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya.

Adanya kebijakan ini pemerintah daerah perlu memfokuskan penerapan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi lebih mandiri sehingga dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat atau sering disebut dengan istilah pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (*power*) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan (Widjajanti, 2011: 103). Poros dalam pemberdayaan masyarakat ini bukan hanya terletak pada kegiatan yang dilakukannya saja namun partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan juga memberikan pengaruh yang signifikan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara terencana melalui tahapan pembangunan yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat (Deswimar, 2014: 42). Paradigma pembangunan baru menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilakukan atas inisiatif dan dorongan dari masyarakat. Sehingga masyarakat harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pembangunan di kelurahan merupakan pendukung utama keberhasilan pembangunan nasional dimana yang diketahui sebagian besar masyarakat Indonesia ada di kelurahan dengan berbagai profesinya, jadi sudah kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemahaman akan pentingnya Pembangunan di kelurahan sebagai pilar keberhasilan pembangunan nasional menjadi semakin jelas. Kelurahan Talang Semut dengan komposisi penduduk yang sebagian besar masih mengandalkan berbagai profesi di sektor pertanian dan usaha kecil, memiliki peran vital dalam menyumbangkan kontribusi ekonomi dan sosial yang signifikan.

Sebagai kelurahan yang menggambarkan keberagaman profesi dan latar belakang masyarakat desa di Indonesia, Kelurahan Talang Semut menjadi focus utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia serta mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan memulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan akses pendidikan, Kelurahan Talang Semut mengukuhkan fondasi yang solid untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Pemerintah Kelurahan Talang Semut perlu memberikan perhatian khusus pada pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung konektivitas internal dan eksternal. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan akses listrik bukan hanya mempermudah mobilitas penduduk, tetapi juga merangsang pertumbuhan usaha dan aktivitas ekonomi lokal. Pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti pertanian berkelanjutan dan usaha mikro, adalah langkah penting menuju kesejahteraan yang lebih baik. Melalui pelatihan dan dukungan teknis, masyarakat Kelurahan Talang Semut dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Di samping itu, pendekatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan membantu memastikan kelangsungan lingkungan yang sehat dan lestari. Sebagai kelurahan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, sosial, dan ekologi, Kelurahan Kedaung berpotensi menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam era teknologi informasi yang semakin maju, pemanfaatan informasi dan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam memberdayakan masyarakat Kelurahan Talang Semut.

Dengan bekerja bersama, baik pemerintah dan masyarakat, Kelurahan Talang Semut dapat mengarahkan upaya pembangunan ke arah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan menyeluruh. Melalui sinergi ini, Kelurahan Talang Semut akan

semakin mendekati visi pemberdayaan yang lebih baik untuk masyarakatnya dan menjadi bagian penting dalam kesuksesan pembangunan nasional.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan, mengontrol lingkungannya dan dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya (Balqis, 2023: 40). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip pengelolaan pembangunan yang partisipatif, pada lingkup pemerintah menghadirkan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis dan bertanggung jawab begitu pun pada tatanan masyarakat mereka dilibatkan dalam proses pembangunan seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Pemerintah desa harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi pelaksanaan atau implementasi pada proses pembangunan (Simbolon, dkk, 2021: 295). Dalam konteks Kelurahan Talang Semut, peran pemerintah desa menjadi sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan dan implementasi proses pembangunan. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memimpin berbagai inisiatif yang mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan komunitas. Hal ini mencakup pengaturan sumber daya, merancang kebijakan pembangunan, melaksanakan program dan proyek, mendorong partisipasi masyarakat, serta memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam menggalang dukungan dari berbagai pihak dan menjadi suara masyarakat dalam forum yang lebih luas. Melalui peran yang aktif dan efektif ini, pemerintah desa di Kelurahan Kedaung dapat memastikan bahwa pembangunan berjalan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, dan ekologi di wilayah tersebut.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan untuk kepentingan bersama.

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah kelurahan diatur Penyelenggaraan pemerintahannya dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa pemerintah kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur di pasal 5 ayat (1) bahwa lurah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lurah akan bekerjasama dengan beberapa anggota ASN lainnya yang sudah memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Yaitu Sekretaris lurah yang memiliki tugas mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian, Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pelaporan di bidang urusan pemerintahan dan pertanahan serta pemberdayaan masyarakat, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban kelurahan.

Muh. Zulkarnain (2018) mengatakan bahwa Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian ini adalah Peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona diwujudkan dengan empat garis besar yakni Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Keempat indikator tersebut sudah dijalankan sesuai dengan peranan masing-masing. Hal serupa yang dijelaskan dengan Mirna Andriani (2015) bahwa Peran Pemerintah Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Hasil penelitian pemerintah Kelurahan Takalar sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terutama sebagai fasilitator dengan pemerintah kabupaten dan program-program pemberdayaan nasional, karena pemerintah kelurahan merupakan level pemerintahan terbawah yang mengetahui keadaan sebenarnya dari warga masyarakatnya terutama di bidang sosial budaya dan ekonomi, Kesehatan maupun pendidikan, akan tetapi tingkat pendidikan warga masyarakat yang tinggi belum menjamin kesejahteraan warga dibidang Pendidikan.

Heny Wahyu Saputro (2008) menjelaskan bahwa Peranan Pemerintah mengenai Kelurahan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Tentang Pelaksanaan Program Kredit Petani Miskin (KPM) di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban). Hasil penelitian tersebut

Pemerintah Kelurahan Mondokan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator antara petani dengan pihak pemberi antuan dalam hal ini pemerintah daerah. Fungsi tersebut mendorong masyarakat dapat secara mandiri dalam memberdayakan perekonomiannya. Murodi Yahya Kasani (2011) dengan judul Peran Kepala Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kelurahan Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran kepala kelurahan Tebon dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan jalan memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin kelurahan dengan baik. Langkah-langkah yang dilakukan kepala kelurahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, melakukan rebug lingkungan secara terprogram, melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, melakukan rebug kelurahan secara periodik dan memanfaatkan potensi yang ada di dalam masyarakatnya.

Tutik Haryani dan Siska Kuswoyo (2022) menjelaskan jika Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan 2) Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari: Faktor pendukung dalam pelaksanaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, dan tingkat pendidikan, Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat. Menurut Gita Andini, Dadan Kurniansyah dan Kariena Febriantini (2022) bahwa Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai peran regulator, pemerintah kelurahan belum memiliki peraturan sekaligus arahan khusus terkait PNT dan PKH. Sebagai peran dinamisor yaitu mampu mengadakan kegiatan pelatihan. Sebagai peran fasilitator yaitu hanya mampu memberikan bantuan berupa barang saja. Sebagai peran katalisator yaitu belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan belum melakukan promosi potensi wilayah.

Ahmad dan Nur Afni (2022) bahwa Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Nelayan (Kelompok Nelayan) di Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini adalah pemerintah Kelurahan Takatidung memiliki peran penting dalam kelancaran kegiatan nelayan dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang sangat menunjang keberhasilan dan kemudahan para nelayan dalam proses penangkapan ikan, walaupun memiliki kendala dengan harusnya membentuk sebuah kelompok agar dapat mendapat bantuan tersebut. adapun faktor yang mempengaruhi peran pemerintah kelurahan dalam kelompok ini proses sosialisasi berlangsung, sehingga manusia menjadi dewasa dan mampu menyesuaikan diri. dengan demikian, hampir dari seluruh waktu dalam kehidupan sehari-hari dihabiskan melalui interaksi dalam kelompok, dididik dalam kelompok, belajar di dalam kelompok, bekerja di dalam kelompok, dan beraktivitas di dalam kelompok. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa pada setiap perkembangannya, manusia membutuhkan kelompok. Menurut Gregerius Edo Marpaung (2022) bahwa Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Balon Kabupaten Simalungun). Hasil penelitian menemukan bahwa Peranan Pemerintahan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu pembangunan atau perubahan di lingkungan kelurahan dilakukan dengan program pemerintah yaitu Pemberdayaan melalui bina masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Dan juga melakukan Pemberdayaan melalui Bina lingkungan yang baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial, pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan alam dan lingkungan sosial dengan semangat gotong royong. Julianto Salonga Palangan (2020) bahwa Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mentirotik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kelurahan Mentirotik dalam pemberdayaan pada aspek bina manusia, tidak pernah melakukan program pelatihan pengembangan keterampilan atau penyuluhan kepada masyarakat. Pada aspek bina usaha, pihak pemerintah Kelurahan Mentirotik tidak pernah memberikan bantuan kepada masyarakat. Pada aspek bina lingkungan, pihak Pemerintah Kelurahan Mentirotik senantiasa menjalin koordinasi dengan masyarakat agar menjaga dan melestarikan lingkungan. Pada aspek bina kelembagaan, pihak Pemerintah Kelurahan Mentirotik membuat sebuah lembaga yang mengelola program pemberdayaan tersebut namun belum berjalan dengan maksimal

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi serangkaian masalah yang berulang kali muncul dalam pemberdayaan masyarakat. Masalah-masalah ini mencakup sejumlah aspek yang merentang dari kurangnya kesadaran akan peran yang diemban oleh aparat kelurahan Talang Semut dalam mengakselerasi proses pemberdayaan masyarakat hingga perhatian terhadap perilaku aparat yang cenderung bermalasan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Keadaan ini memperlihatkan adanya gap yang signifikan antara harapan dan realitas di lapangan, di mana ekspektasi terhadap keterlibatan dan dukungan yang konstruktif dari aparat kelurahan belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini mendorong perlunya penelitian yang lebih terfokus dan komprehensif. Dalam hal ini, pemilihan lokasi penelitian di Kelurahan Kedaung dianggap sebagai langkah yang tepat dan strategis. Kelurahan Talang Semut memiliki sejumlah karakteristik yang relevan dengan permasalahan yang ingin diungkapkan oleh penelitian ini. Tingkat interaksi yang tinggi antara aparat kelurahan dan masyarakat di Kelurahan Talang Semut menjadi peluang untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran aparat kelurahan seharusnya diterjemahkan dalam pemberdayaan masyarakat dan sejauh mana kenyataan di lapangan mencerminkan hal tersebut.

Ketidakmerataan dalam pemberdayaan masyarakat mungkin telah menyebabkan rasa ketidakpuasan dan kebingungan di kalangan warga. Dengan memusatkan perhatian pada Kelurahan Talang Semut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kesenjangan antara tujuan deklaratif aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan apa yang

sebenarnya dialami oleh warga sehari-hari. Selain itu, keterlibatan dalam masyarakat yang lebih luas juga memberikan peluang untuk mendokumentasikan dan menganalisis perilaku aparat kelurahan yang mungkin mencerminkan kurangnya motivasi atau tanggung jawab.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas isu-isu yang berkaitan dengan peran aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi solusi yang berpotensi untuk memperbaiki kondisi yang ada dan merumuskan rekomendasi yang lebih baik dalam mengoptimalkan kinerja aparat kelurahan, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung dan mempromosikan pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Kerangka Teori

Peran

Peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan oleh individu yang mengisi posisi tertentu dalam suatu struktur sosial. Peran merupakan konsep sosial yang dihasilkan dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu menginternalisasi dan memahami peran yang diharapkan dari posisi sosial yang mereka miliki, dan selanjutnya memainkan peran tersebut dalam interaksi sosial dengan orang lain. (Koentjaraningrat, 2014: 25).

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan, tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Perilaku individu dalam memainkan peran mereka mempengaruhi struktur sosial masyarakat secara luas. Ketika individu melaksanakan peran mereka dengan baik, mereka memberikan kontribusi positif dalam mempertahankan dan memperkuat keteraturan sosial. Perilaku individu yang sesuai dengan norma-norma dan harapan sosial membantu menjaga keselarasan, saling ketergantungan, dan kerjasama dalam masyarakat.

Contohnya, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, aparat kelurahan sebagai individu penting dalam struktur sosial masyarakat memiliki peran dalam menyediakan pelayanan publik, merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan, serta berinteraksi dengan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Dengan memainkan peran mereka secara efektif, aparat kelurahan membantu memperkuat struktur sosial dengan memberikan layanan yang adil, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat, dan menjaga keterbukaan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Kesimpulannya peran sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat mencerminkan bagaimana individu memainkan peran mereka dalam memenuhi tugas, tanggung jawab, dan harapan sosial yang ditetapkan dalam suatu sistem sosial. Peran individu mempengaruhi struktur sosial dan keteraturan masyarakat

secara keseluruhan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, aparat kelurahan merupakan salah satu contoh individu yang memainkan peran penting dalam memperkuat struktur sosial melalui perilaku yang responsif, adil, dan berpartisipasi.

Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapat akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting. Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, hingga akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan pada dasarnya dibangun dari ide yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri.

Terdapat dua kecenderungan proses pemberdayaan yaitu pertama adalah proses pemberdayaan yang menekankan ke proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang kedua adalah lebih menekankan melalui proses dialog. kecenderungan ini terkait dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya (Kartasmita, 2016: 58).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto, 2015: 74) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Kusumahadi (dalam Sutawa, 2022: 414) menyatakan bahwa program pembangunan dapat dikategorikan sebagai proses pemberdayaan jika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik ke sumber-sumber daya, terpenuhinya kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol social terhadap aspek lingkungan.
2. Pengembangan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengelola organisasi lokal (self-management).
3. Pengembangan pemikiran kritis masyarakat agar mereka memiliki pemikiran yang lebih kritis terhadap diri dan lingkungannya.

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, namun sering kali ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan semua potensi yang dimiliki masyarakat agar mampu melawan serta melepaskan diri dari jeratan kemiskinan (Mardikanto, 2019- 75). Pemberdayaan memiliki makna kesetaraan, adil, dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi oleh salah satu atau beberapa pihak dalam suatu komunitas

masyarakat. Dengan demikian maka pemberdayaan memiliki makna sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya sehingga mampu hidup secara mandiri dan sejahtera.

Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto dan Soebiato (2019) membagi tahapan kegiatan pemberdayaan menjadi beberapa tahapan yaitu :

1. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja. Sebelum melakukan kegiatan, harus ada kesepakatan antara stakeholder terkait seperti perwakilan masyarakat setempat, aparat pemerintah, akademisi, LSM, dll mengenai penetapan wilayah kerja. Hal itu penting dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan membangun sinergi dengan seluruh stakeholder yang ada demi keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilakukan.
2. Sosialisasi kegiatan. Merupakan upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Dalam sosialisasi kegiatan juga dikemukakan tentang pihak-pihak terkait yang akan diminta partisipasinya, pembagian peran yang diharapkan, pendekatan dan strategi yang akan dilakukan. Proses sosialisasi ini menjadi sangat penting karena akan menentukan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang akan dijalankan.
3. Penyadaran masyarakat. Tahapan kegiatan ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya baik sebagai individu dan anggota masyarakat maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Termasuk juga di dalamnya upaya menunjukkan adanya masalah yang berkaitan dengan keadaan sumber daya dan lingkungan mereka. Selain itu juga dilakukan analisis Bersama menyangkut potensi, faktor penyebab terjadinya masalah terutama kelemahan internal dan ancaman eksternal untuk selanjutnya merumuskan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaan.
4. Pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat ini penting dilakukan karena untuk melaksanakan perubahan guna memecahkan masalah sering kali tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi memerlukan pengorganisasian masyarakat. Termasuk dalam tahapan ini adalah pemilihan pemimpin, pembentukan kelompok tugas, pembagian peran, dan pengembangan jaringan kemitraan.
5. Pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini terdiri dari berbagai kegiatan pelatihan untuk menambah atau memperbaiki pengetahuan dan kemampuan teknis, ketrampilan manajerial, dan perubahan sikap/wawasan. Pengembangan kegiatan terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan penting untuk membangun kemandirian dan menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa pemberdayaan yang dilakukan mampu memperbaiki kehidupan mereka.

6. Advokasi kebijakan. Kegiatan advokasi ini diperlukan guna memperoleh dukungan politik melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan juga legitimasi dari elit masyarakat.
7. Politisasi. Politisasi mengandung arti upaya terus menerus memelihara dan meningkatkan posisi tawar melalui kegiatan politik praktis untuk memperoleh legitimasi.

Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Aparat Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talang Semut Kota Palembang” menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah peran yang dijalankan oleh aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan Talang Semut sudah sesuai atau belum dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian tentang peran aparat kelurahan Talang Semut dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, bertujuan untuk memahami dan mendalami peran serta upaya aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat secara holistik dan mendalam. Menurut Raco (2018) terdapat beberapa tujuan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini antara lain:

1. Menggali pemahaman yang mendalam tentang peran aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk cara-cara yang dilakukan, kendala dan tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
2. Mempelajari pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap peran aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan atau program yang dilaksanakan.
3. Menjelaskan konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi dan membentuk peran aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Menjelaskan proses interaksi dan hubungan antara aparat kelurahan Talang Semut dengan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang peran aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi atau solusi yang lebih efektif dan efisien dalam pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Semut.

Penelitian ini memfokuskan pada peran yang dijalankan oleh aparat kelurahan apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kedaung. Dimana terkadang peran aparat kelurahan masih belum sesuai dengan tupoksinya dalam pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat di kelurahan Talang Semut. Dengan menggunakan Teori Soekanto (2018: 213), mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah kelurahan merupakan faktor penentu dalam pembangunan dan pemberdayaan di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga keberhasilan pembangunan di kelurahan tergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintah kelurahan diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa pemerintah kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur di pasal 5 ayat (1) bahwa lurah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Di Kelurahan Talang Semut memiliki berbagai macam program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dikerjakan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan Talang Semut mencakup pemberdayaan kelompok tani, pengembangan modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan, peminjaman modal untuk kelompok tani, dan pembinaan keagamaan. Dari keseluruhan program pemberdayaan di kelurahan tamaona berfokus pada pengembangan masyarakat melalui lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan Talang Semut. (a) Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona. Pengembangan kapasitas manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan. Upaya pemerintah kelurahan amaona dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui bina manusia dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan program didominasi penyuluhan dibidang pertanian dikarenakan potensi utama wilayah elurahan ada dibidang pertanian dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani.

Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan kelompok tani bermacam-macam seperti penyuluhan jajar legowo (pola tanam), sosialisasi PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), serta pertemuan rutin kelompok tani. Dari sosialisasi yang diadakan dibidang pertanian tentunya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat petani, baik cara menanam padi secara modern, pemberantasan hama serta diberikan bekal pengetahuan dengan tidak hanya Bertani ecara lokal tapi memasukkan industrialisasi dan modernisasi pertanian seperti Bertani

secara holtikultura supaya masyarakat bisa berkembang dan mendapatkan pendapatan yang lebih bagus.

Akan tetapi sosialisasi yang diadakan belum maksimal terlihat dari sosialisasi yang diadakan tidak menjangkau keseluruhan masyarakat petani dan pola pikir masyarakat yang susah menerima begitu saja pengetahuan yang diberikan sehingga kecenderungan sosialisasi yang diadakan tidak memberikan dampak apapun. (b) Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina usaha dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Semut. Bina usaha diwujudkan dengan pengembangan kapasitas usaha, bina usaha menjadi suatu upaya yang sangat penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia tanpa bina usaha tidak memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan justru menimbulkan kekecewaan.

Dikelurahan tamaona bina usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok kecil dan bina usaha dibidang pertanian diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bibit, pupuk, serta adanya pula asuransi padi yang tersedia seperti bantuan modal untuk kelompok simpan pinjam perempuan yang tentunya dapat membantu mengembangkan usaha mereka sehingga mereka punya daya untuk berkembang.

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu program yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dalam rangka membantu pengembangan usaha mereka. Setiap kelompok menerima besaran yang berbeda-beda, begitu juga untuk setiap orang menerima pinjaman berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kemampuan.

Selain bantuan modal kelompok simpan pinjam bentuk bina usaha yang ada dikelurahan Talang Semut adalah dalam bentuk bantuan ke pengembangan usaha kelompok tani baik bantuan modal yang diberikan maupun bantuan bibit, pupuk dan fungsida yang diberikan serta adanya asuransi padi. Bantuan modal pinjaman untuk petani sangat membantu perekonomian petani, ini merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan perekonomian para petani dikelurahan Talang Semut. Meskipun bunganya cukup tinggi akan tetapi petani merasa sangat terbantu dengan modal bantuan tersebut.

Meskipun ada bantuan bibit dan pupuk melalui kelompok tani yang mengajukan rancangan defenitif kelompok akan tetapi tidak mempunyai impact yang signifikan bagi peningkatan usaha petani dikarenakan butuh waktu lama untuk mendapatkan bantuan itu. Selain bantuan bibit yang disubsidi pemerintah akan tetapi menurut masyarakat harganya sangat mahal jadi masyarakat cenderung membuat bibit padi sendiri dengan cara lokalnya meskipun kualitasnya memang berbeda, bibit yang dibuat secara lokal memang tidak merata ukurannya sehingga hasil pertaniannya juga tidak mempunyai kualitas yang baik.

Selain bantuan bibit, pupuk dan fungsida juga terdapat asuransi padi yang bertujuan agar petani mendapatkan jaminan dengan serangan hama dan berbagai penyebab gagal panen. Jadi pendaftar asuransi padi yang kemudian gagal panen akan mendapat modal untuk menanam. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan asuransi untuk menjamin padi yang ditanam oleh petani. (c) Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona. Dalam pembinaan lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun

lingkungan sosial, pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan Kembali semangat gotong royong diantaraarganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Tamaona bisa dikatakan kelurahan swadaya baik dalam menjaga pembangunan fisik ataupun membangun suasana dan iklim yang kondusif ke masyarakat dibangun dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Selain melalui gotong royong pembinaan lingkungan sosial juga dilakukan dengan pembinaan keagamaan, agamadiyakini menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Pembinaan keagamaan dikelurahan tamaona diwujudkan dengan membentuk pengurus masjid di setiap masjid yang ada sehingga kegiatan kelurahan yaitu pengajian rutin bisa dikontrol, selain itu diberikan pula kursus untuk da'i, pendataan untuk penceramah yang ada dan tunjangan imam dusun dan imam rawatib untuk memotivasi mereka melanjutkan syiar agama.

Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Semut Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha, bina lingkungan mensyarakatkan tersedianya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Artinya, bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting dari pembentukannya seberapa jauh kelembagaan yang telah terbentuk itu telah berfungsi secara efektif.

Pembinaan terhadap Lembaga masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga masyarakat. Menurut Santoso S. (1995:52) mengungkapkan beberapa cara dilakukan dalam pembinaan adalah: pemberian bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan instruksi dan memberikan buku petunjuk.

Dikelurahan Talang Semut pembinaan terhadap lembaga masyarakat dilakukan dengan memberikan arahan, pelayanan atau rekomendasi kegiatan yang mudah dan cepat, memfasilitasi kegiatan Lembaga masyarakat serta memberikan dukungan kepada lembaga yang ada untuk pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat tersebut.

Selain pembinaan dari pemerintah ke lembaga masyarakat terdapat pula pembinaan ke lembaga pemerintah itu sendiri dalam bentuk jumat ibadah yang dilakukan setiap minggu di hari jum'at. Jadi setiap hari jumat sebelum memulai aktivitas aparat kelurahan, dihadirkan penceramah untuk memberikan siraman qalbu ke aparat pemerintah agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Salah satu faktor penentu dalam keberhasilan sebuah program adalah kerjasama antar stakeholder yang ada, pemerintah kelurahan tidak mampu berjalan sendiri tanpa bantuan lembaga masyarakat. Pembinaan kelembagaan dikelurahan tamaona mendapat perhatian dari pemerintah kelurahan sehingga program-program lembaga masyarakat dapat berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah dan lembaga masyarakat. (d) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah

Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa. Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor yang mendukung peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yakni: pertama, partisipasi masyarakat merupakan faktor utama terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, mulai dari partisipasi ide/pikiran melalui forum musrenbang, dan didominasi oleh partisipasi tenaga dikarenakan dominasi program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan swadaya seperti pengerjaan irigasi pertanian dan pembuatan jalan tani baru, masyarakat sangat antusias dalam pengerjaannya disebabkan masyarakat memahami bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan mereka.

Kedua, Keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan timbul begitu saja, tetapi karena adanya faktor yang mendorongnya untuk berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan kesadaran yang muncul, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam merumuskan visi pembangunan, dengan begitu tujuan dari pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Ketiga, Tingkat Pendidikan di kelurahan cukup tinggi sudah sadar dengan namanya pendidikan, dimana jumlah masyarakat yang mengenyam Pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SLTA maupun Perguruan Tinggi cukup tinggi begitupun tamatan pendidikan mereka sudah bagus, mereka sudah sadar tentang Pendidikan dikarenakan biaya pendidikan yang sudah di gratiskan serta kemauan masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia sudah baik dan juga ditunjang dengan sarana pendidikan yang sudah baik dilihat dari keberadaan sekolah hampir ada disetiap lingkungan.

Sedangkan yang menjadi factor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Semut Kota Palembang yakni: Pertama Keterbatasan anggaran dalam sebuah program dapat membuat program yang direncanakan terkendala sebab segala sesuatunya butuh biaya terlebih dengan pemberdayaan dalam pengembangan akses sumber daya butuh biaya yang sangat besar sehingga tanpa anggaran program itu tidak bisa terlaksana. Anggaran yang terbatas mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan menjadi terhambat. Terkadang ada suatu permasalahan yang mendesak dikerjakan lalu tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk hal tersebut pemerintah kelurahan memanfaatkan swadaya dari masyarakat.

Kedua, pola pikir adalah cara berpikir seseorang dalam mewujudkan ide, rencana dan cita-citanya yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh perasaan dan pandangannya ataupun sikap perilaku (*attitude*). Dengan kata lain pada suatu saat sikap seseorang dipengaruhi oleh perasaan atau emosinya. Di kelurahan tamaona pola pikir masyarakat yang susah menerima hal-hal baru terdapat pula pola pikir masyarakat yang statis dan acuh terhadap pembangunan yang dilakukan. Pola pikir masyarakat yang acuh terhadap proses pembangunan serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap sebuah program menjadi suatu kendala terhadap keberhasilan tujuan pemberdayaan masyarakat, begitupula dengan pola pikir yang lambat

menerima hal-hal baru meskipun hal baru tersebut dapat meningkatkan harkat martabat mereka.

Ketiga, Aturan yang mengikat, beberapa peraturan dinilai menghambat dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk peraturan tentang pengangkatan perangkat desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Terkadang aturan dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi kewilayahan disuatu daerah dan ini dirasakan dikelurahan Talang Semut dimana perangkat kelurahan semisal pengangkatan kepala lingkungan yang harus memenuhi persyaratan administrasi sehingga terkadang tokoh kharismatik yang dimiliki dan mampu di dengar oleh masyarakat tidak memenuhi persyaratan administrasi didalam pengangkatan menjadi kepala lingkungan sehingga yang terjadi program pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat dan kurangnya partisipasi masyarakat didalamnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian Peran Aparat Kelurahan Talang Semut dalam Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa aparat berperan dalam pemberdayaan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Norma aparat Kelurahan Talang Semut dalam masyarakat Norma yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu keterbukaan dan transparansi, keadilan dan kesetaraan, partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan dan tanggung jawab, kolaborasi dan kemitraan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Norma-norma tersebut berhasil diimplementasikan dan dijadikan patokan dalam pelaksanaan peran aparat dalam pemberdayaan masyarakat serta akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan tata Kelola pemerintahan yang baik.
2. Perilaku aparat Kelurahan Talang Semut dalam masyarakat Tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh aparat kelurahan Talang Semut telah berhasil dalam pemberdayaan masyarakat walaupun dinilai lemah karena tidak ditemukannya data sebagai penguat argumentasi. Tetapi, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh aparat kelurahan telah memberikan dampak positif dan memberdayakan masyarakat secara efektif.
3. Perilaku penting individu dalam struktur sosial masyarakat Keberhasilan aparat Kelurahan Talang Semut sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat tercermin dalam dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat merasakan peningkatan akses terhadap layanan publik, peningkatan kualitas hidup, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan keterlibatan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, aparat Kelurahan Talang Semut telah berhasil menjadi individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat dalam konteks pemberdayaan. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dalam peran dan tugas

mereka sebagai aparat pemerintahan, tetapi juga dalam kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang harmonis dan memberdayakan masyarakat secara holistic.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka rekomendasi yang dapat Peneliti berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Penting untuk menjaga kontinuitas dan melakukan perbaikan terus-menerus dalam program pemberdayaan masyarakat melalui evaluasi berkala dan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, diperlukan penguatan kapasitas bagi aparat dan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pemahaman mereka tentang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program.
2. Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan keberhasilan Tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh aparat kelurahan Kedaung dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, penting untuk terus mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program. Kedua, aparat kelurahan perlu terus mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat secara komprehensif dengan melakukan survei, wawancara, dan pengumpulan data lainnya. Ketiga, perlu dipertahankan upaya dalam perencanaan program yang baik, termasuk penentuan tujuan yang jelas, alokasi sumber daya yang memadai, dan pengaturan tugas yang efisien.
3. Rekomendasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan aparat Kelurahan Kedaung sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat tercermin dalam dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk memastikan kelanjutan keberhasilan ini, perlu dilakukan beberapa rekomendasi. Pertama, penguatan kompetensi aparat Kelurahan Talang Semut melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, pemecahan masalah, dan manajemen konflik. Kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan program dan evaluasi serta mengadakan pertemuan rutin untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Ketiga, pentingnya akses terhadap informasi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses tentang program pemberdayaan dan kebijakan publik. Keempat, membangun kolaborasi dan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk memperluas sumber daya dan dukungan. Terakhir, melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki program dan meningkatkan pembelajaran.

Daftar Pustaka

Ahmad, A., & Afni, N. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Nelayan (Kelompok Nelayan) di Kelurahan

- Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. 3(05), 149-156.
- Andini, G., Kurniansyah, D., & Febriantini, K. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Kerawang Kulon. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2055-2062.
- Andriyani, Mirna. (2015) Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Balqis, A. S. (2023). Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Home Industri Cepelis 'Nabil Jaya' (studi di Link, Ketileng Barat No. 122, RT. 14/RW. 02, Ketileng, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41-52
- Iskandar, A. H. (2020). SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Haryani, T., & Kuswoyo, S. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut. *Jurnal Sociopolitico*, 4(1), 36-48.
- Julianto Salonga Palangan, J. (2020). Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mentoriku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).
- Kasani, M. Y. (2013). Peran Kepala Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kelurahan Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Kartasasmita, G. (2016). Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES
- Koentjaraningrat, K. (2014). Antropologi hukum. Antropologi Indonesia
- Marpaung, G. E. (2022). Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun).
- Mardikanto, T. (2019). Poerwoko soebiato. Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302
- Soekanto, Soerjono. (2018). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutawa, G. K. (2022). Issues on Bali tourism development and community empowerment to support sustainable tourism development. *Procedia economics and finance*, 4, 413-422.
- Wahyu Saputro, H. (2017). Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Tentang Pelaksanaan Program

Kredit Petani Miskin (KPM) di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat.

Zulkarnain, M. (2018). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 103-11

Peraturan-Peraturan :

UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 73 Tentang Kelurahan